Tidak ada prediksi yang benar-benar akurat. Begulah kirakira yang harus kita palaami terkai prediksi Pransis Pukuyarna yang begini yakiri Kapitalame dan Demokrasi weri Barat akan memainkan peran yang dominan dalam aras global pasca runtuhnya Komunisura. Memang selesainya Perang Dingin telah mentahih peta politik dimias. Namun ternyata iru hanya sementura. Barat yang terlahi fokus pada Komunisura lupu halwa ada ideologi-deologia lam seperti Heloologi Islam Galammane dalam berangin hentuhnya gang ternyat menjunyaa kekutaan penyembang. Islamisme dengan segala kekustannya terus meriasuk ke negara-negara Demokrasi yang masih rentan seperti di Indonesia, Islamisme telah perhadap-badapan dengan Pancasula dan terus berebut pengarah dengan Kapitalisme dan Demokrasi di Nusantara.

Jika selama Perang Dingin Indonesia hanya menjadi figuran, kini harus berjibaku umuk bertahan Jika selama Perang Dingin Indonesia haiwa menjadi figuran, kini harus berjibaku unudi bertahan dari desakan Ishamisne dan Kapitalistine. Negara kini bersusha popul untuk menersidiasis kembali milai-nihii Pancasila yang sudali hampir dilupakan ditengah pertarungan ideologi sideologi besar di Indonesia. Segerap elemen bangsi Indonesia idaki permah mengadari balawa Pancasila pasti iskan musuk dalam pasaran ideologi duna. Namun sayangsya infrastrukur negara idaka cinkup kokoli dalam menopang Pancasila untuk mengati ideologi yang tangguh melainakan kian han Pancasila sakan kehilangan makarusa dan menjadi rapuh. Padahal Pancasila launs tensi mengbadapi desakan Islamisme melalui jalur politik dan kekerasan dan pada saat yang sama juga berusaha keluar dari pengaruh Kapitalism

Buku ini dihadirkan sebagai upaya o<mark>leh Universitas Jember, CHRM dan para penulis untuk terus</mark> mendiskusikan nilai-nilai Pancasila. <mark>Semoga penerbitan buku ini dapat melengkapi referensi para</mark> pembaca tentang Pancasila dan d<mark>apat memberikan sumbangsih untuk menjaga kedaulatan</mark> Indonesia.

- ELEI FLUS:

  Al Khanf, S. H., (Universitus Jernber), M.A., (Universitus Galpih Mada), LLM, (Universitus Lauruster), Pl.D (SOAS Universitus Locaccio) adalab Direktur the Cerare for Human Regles, Multiculturalism and Magration (CHRM2)
  Universitus Jennber. Lancotta-Joulet.

  Managan Kamuw Watdaya, S.H., (Linicrostas Jepsieral Soediminut, LL,M. (Linicrostas Modald), harafedat Dadare Clauserasis, Balboundt adulti self persona di Fakultus Hakun Universite, Jenekerd Soedierum, Mires Aniri Bandon, S.H., (Linicrostas Candona), Mires Aniri Bandon, S.H., (Linicrostas Landona), Manadon, M.H., (Deventos) belan Soldonasis (D., C.C. Beinstein Manadona), C. C. Beinstein M. (Linicrostas Queenshand) adulti pengajar di Fakultus Hakuni Universitas Lambong Mandstant.

PANCASILA, TRANSNASIONALISME DAN KEDAULATAN NEGARI

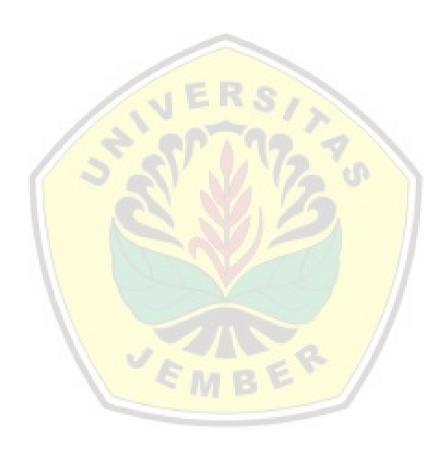
PANCASILA, TRANSNASIONALISME DAN KEDAULATAN NEGARA





Al Khamit, S.H., 14-M., Ph.D. Mammiggal K. Wandaya S.H., 14, M Mirza Satria Buana S.H., M.H. Ph.D





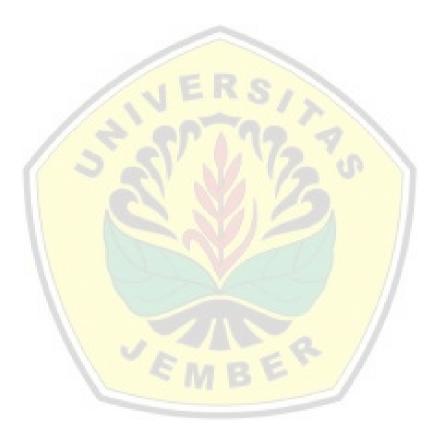
# PANCASILA, TRANSNASIONALISME DAN KEDAULATAN NEGARA

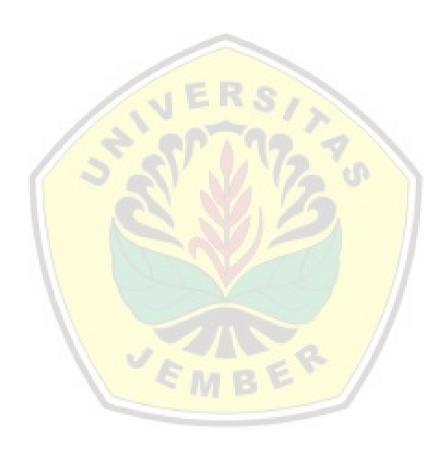
#### **Editor:**

Al Khanif<mark>, S.H., LL.M., Ph.D</mark> Manunggal <mark>K. Wardaya S.H., LL.M</mark> Mirza Satria Buana S.H., M.H, Ph.D









#### Pengantar Editor

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya program penerbitan buku Pancasila yang secara berkala diterbitkan oleh Universitas Jember dan the Centre for Human Rights, Multiculturalism (CHRM2) dengan tema "PANCASILA, TRANSNASIONALISME DAN KEDAULATAN NEGARA" berhasil diterbitkan. Hampir selama setahun terakhir tim editor bekerja keras untuk 'mendamaikan' dinamika ideologis baik dalam proses telaah substantif naskah dan finalisasi naskah sebelum dikirim ke penerbit. Semua tulisan-tulisan yang masuk ke redaksi telah melalui proses penelaahan dan seleksi dengan metode *blind review*, tanpa prasangka dan/atau bias *a priori*. Sejumlah naskah yang masuk dan kami pandang berbobot dan segar berhasil kami pilih. Dengan sendirinya pula, terdapat beberapa naskah yang terpaksa harus ditinggalkan karena dirasa masih jauh dengan tema besar buku ini.

Tiga kata kunci yang menjadi pokok bahasan buku ini sejatinya berkelindan kuat, dan amat relevan dengan dinamika politik dan kema<mark>syarakatan di Indonesia saat ini. Transnasionalisme yang dia</mark>nggap sebag<mark>ai anak ka</mark>ndung globalisasi kerap dianggap sebagai 'pisau bermata dua' dimana di satu sisi membawa keuntungan kepada negara-negara, sedang<mark>kan disisi</mark> lain membawa p<mark>ote</mark>nsi hegemoni id<mark>eologis lat</mark>en dan domina<mark>si jejaring a</mark>ktor ekonomi yang berbahaya dan <mark>predatorik</mark>. Dalam konteks ekonomi internasional, transnasionalisme adalah suatu keniscayaan seiarah (historical necessity) dikarenakan semakin mengerutny<mark>a hubungan-hubungan antar negara sehingga m</mark>enciptakan global village yang mempengaruhi kebijakan politik, hukum dan ekonomi negara-negara di dunia. Mobilitas barang (komoditas), orang, pemikiran (ideologi) dalam lintas kawasan adalah suatu keniscayaan yang tidak terhindarkan, dimana sekat-sekat antar negara dan regional semakin memudar. Dibukanya kebijakan pasar bebas (free trade policy) oleh beberapa negara-negara adidaya (super power states) juga mempercepat terjadinya fenomena ini.

\_

Ribut Lupiyanto, 'HTI, Ideologi Transnasional, Dan Geopolitik Global' detiknews (Mei 2017) <a href="https://news.detik.com/read/2017/05/24/114816/">https://news.detik.com/read/2017/05/24/114816/</a> 3510176/103/htiideologi-transnasional-dan-geopolitik-global> accessed 30 May 2018.

# Digital Repository Universitas Jember Pengantar Editor

Sejatinya, transnasionalisme lahir dari 'rahim' pemikiran ekonomi yang berlanggam kapitalistik-liberal. Dalam relasi ekonomi transnasionalisme, hubungan antar negara tidak melulu dijalankan oleh pemerintah, walaupun secara formal-prosedural, setiap kerjasama antar negara-negara selalu diinisiasi lewat jejaring birokrasi antar negara-negara, namun dalam prakteknya pengaruh korporasi juga berperan besar dalam mempengaruhi keputusan-keputusan strategik suatu negara. Dalam praktik bernegara dan berbangsa, korporasi bahkan cenderung mendominasi ruang-ruang publik dan politik yang sejatinya merupakan domain kebijakan negara. Di Indonesia, kuatnya pengaruh perusahaan-perusahaan multinasional tersebut terhadap hajat hidup orang banyak terlihat begitu telanjang.

Teori ekon<mark>omi liberal *trickle-down effect* merup</mark>akan salah satu kajian teoritik yang gencar didengungkan oleh kalangan transnasionalisme perdagangan, bahwa pada akhirnya pembangunanpemban<mark>gunan yang distimulus oleh raksasa-raksasa ekonomi du</mark>nia akan 'merembes' ke masyarakat sekitar. Namun dalam praktiknya, 'rembesan' terse<mark>but tidak la</mark>h pern<mark>ah terjadi, dikare</mark>nakan kuatnya dominasi perusahaan terhadap supremasi ekonomi suatu negara. Pada akhirnya yang <mark>terjadi a</mark>dalah aliansi *simbiosis mutualisme* antara perangkat peme<mark>rintah de</mark>ngan perusahaan-perusahaan predatori<mark>k yang s</mark>ecara ekspa<mark>nsif mem</mark>berangus hak-hak fundamental warga negaranya. Dalam setting <mark>kedaulata</mark>n negara yang ca<mark>cat str</mark>uktural tersebut, state-corporatism (aliansi korporasi-negara) sangatlah mudah ditemukan. Fenomena ini tentu ny<mark>a diametra</mark>l bagi eksistensi negara Pancasil<mark>a yang me</mark>njunjung tinggi asa<mark>s kekeluargaan dan keadilan sosial, sebagaiman telah</mark> dideriyasi dalam Konstitusi Ekonomi Indonesia dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (Ama<mark>ndeme</mark>n) 1945.

Namun begitu, transnasionalime tidak semata berdimensi dan berefek ekonomi. Arus mobilitas pemikiran dari luar (Timur Tengah) juga membawa ideologi-ideologi sempalan yang cenderung kontra terhadap eksistensi dan kedaulatan hukum nasional. Aliran-aliran keagamaan (terutama Islam) yang berlanggam konservatif kerap muncul dan eksis dalam ruang-ruang publik di masyarakat. Persoalan munculnya agama-agama dalam konteks pertarungan ideologi antar negara ini mulai muncul di sekitar Tahun 1980an dimana Jose Casanova memahaminya

# Digital Repository Universitas Jember Pancasila, Transnasionalisme Dan Kedaulatan Negara

sebagai agama publik.<sup>2</sup> Di beberapa dekade setelahnya, agama (terutama Islam), seakan berusaha mematahkan proposisi Fransis Fukuyama yang dengan yakinnya mengatakan berakhirnya perang dingin secara otomatis menyisakan kapitalisme dan demokrasi versi Barat sebagai penguasa tunggal di dunia.<sup>3</sup> Faktanya, ekspansi agama (Islam) sebagai ideologi baru dalam tatanan kenegaraan modern membaur dan bersaing ketat dengan ideologi-ideologi transnasionalisme di banyak negara. Salah satu contohnya adalah Indonesia dimana agama telah masuk terlalu dalam di ruang-ruang publik, memanfaatkan krisis politik pasca otoritarian di tahun 1998, dan membaur d<mark>engan elem</mark>en-elemen demokrasi di masa transisi demokrasi yang rentan sampai saat ini.

Ideologi Islam transnasional tersebut mengacau pada pergerakan ideologi global yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Indonesia pada saat ini. Islam tentu disepakat<mark>i oleh para pe</mark>nganut<mark>nya sebagai agama yang baik. N</mark>amun ketika <mark>Islam dipolitisir oleh sekelompok orang untuk kep</mark>entingan tertentu, Islam sebagai agama akan bermetamorfosis menjadi Islamisme yang <mark>ditegakkan hanya untuk menjaga ke</mark>pentingan pengusungnya.<sup>4</sup> Islamisme yang oleh pengusungnya diyakini sebagai 'tersempurna' ini mele<mark>wati batas</mark>-batas negara dan bangsa, dan merupakan ideologi tandi<mark>ngan dari konsep negara-bangsa (*nation-state*), khus</mark>usnya Kapita<mark>lisme dan</mark> Demokrasi versi Barat dan kedaulatan negara. <sup>5</sup> Ideologi Islam transnasional tersebut tidak hanya bermain pada ranah peribad<mark>atan dan</mark> dakwah semata, namun juga mera<mark>mbat pad</mark>a ranah 'Islam p<mark>olitik' yang</mark> berorientasi mengganti dasar huk<mark>um negara P</mark>ancasila dengan tafsir kebenaran mereka sendiri. Berbagai kelompok pengusung<mark>nya dengan lantang menyuarakan formalisasi hu</mark>kum Islam dalam ham<mark>pir semua aspek kehidupan bern</mark>egar<mark>a dan</mark> mendorong terbentuknya Khilafah Islamiyah, cita-cita yang sedari awal dituju oleh organisasi Islam fundamentalis semisal Hizbut Tahrir Indonesia. Kelompok Islam transnasionalis ini berevolusi dalam wujud terekstrim

Lihat selengkapnya di José Casanova, Public Religions in the Modern World (University of Chicago Press 2011).

Lihat selengkapnya di Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (Free Press; Maxwell Macmillan Canada; Maxwell Macmillan International 1992).

Lupiyanto (n 1).

Lihat misalnya Al Khanif, *Pancasila dalam pusaran globalisasi* (Penerbit & distribusi, LKiS 2017) 115-119.

# Digital Repository Universitas Jember Pengantar Editor

menjadi kelompok-kelompok radikal dan bahkan ekstrim yang berwujud pada praktik-praktik terorisme.

Cabaran terhadap ideologi negara sebagaimana dibincang diatas tentu perlu ditanggapi melalui arena diskusi yang obyektif dan terbuka. Ideologi Pancasila yang inklusif perlu diperkuat dengan memberi pemahaman dasar akan nilai-nilai transendental-demokratis dalam Pancasila itu sendiri. Islam merupakan salah satu nilai-nilai yang memperkaya Pancasila dan bukannya kontradiktif sebagaimana dicoba kesankan. Alih-alih saling mengalahkan, keduannya dapat membangun relasi yang saling menguatkan, mengokohkan. Islam Ahlussunah Wal Jamaah yang menganut konsep wasathoniyah (berdiri ditengah) semestinya mampu menjembatani friksi-friksi antara agama (Islam) dan negara. Sementara itu, Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa menjadi men<mark>emukan relevansinya untuk membendung p</mark>aham-paham transnasio<mark>nalisme ekono</mark>mi dan <mark>politik diatas. Pancasila ibar</mark>at menjadi penenga<mark>h dalam kuasa tarik menarik antara transnasionalisme</mark> dengan globalisasi dengan sentiment-sentimen ideologis vang sedang menguat saat ini. Dalam hal ini perlu eksistensi Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang mampu memediasi dan memiliki daya lenting guna menjawab tantangan-tantangan zaman menjadi penting untuk direvitalisasi.

Buku ini diharapkan mampu memberi pencerahan akan tantangantantangan transnasionalisme sekaligus memberikan tawaran ide-ide
inklusif-demokratis yang dijiwai oleh semangat Pancasila. Buku ini pula
diharapkan akan memperluas cakrawala pandang bagaimana
implementasi Pancasila menjadikan Negara Kesatuan Republik
Indonesia tak gagap mengalami tantangan zaman, terutama sekali
fenomena global yang kini melanda. Persoalan kekinian terkait
radikalisme agama, intoleransi, dan bahkan terrorisme yang menjadi
persoalan riil dari sekian banyak tantangan yang dihadapi bangsa
Indonesia diharapkan dapat menemukan tawaran solusi dan strategi yang
cerdas dan bernas melalui aneka pemikiran dan gagasan yang tertuang
dalam buku ini.

Jember, 30 Mei 2018

# Digital Repository Universitas Jember Pancasila, Transnasionalisme Dan Kedaulatan Negara

#### Tim editor

Al Khanif Manunggal K. Wardaya Mirza Satria Buana



#### DAFTAR ISI

Pengantar Editor → v

Daftar Isi → ix

# BAB I PANCASILA, KOSMOPOLITANISME DAN TRANSNASIONALISME →

Sila Persatuan Indonesia dalam Miskonsepsi Identitas Geokultural: Perspektif Hubungan Antarnegara → 1 Baiq Wardhani & Vinsensio Dugis

Nasi<mark>onalisme I</mark>ndonesia dalam Era Globalisasi: Sebuah Refleksi Hist<mark>oris → 17</mark> Abubakar Eby Hara

Pancasila sebagai Instrumen Penekan Transnasionalisme Ekonomi dan Hukum Internasional → 45 Mirza Satria Buana

# BAB II PANCASILA DAN MULTIKULTURALISME DALAM ARUS IDEOLOGI TRANSNASIONAL →

Revitalisasi Pancasila Di tengah Arus Globalisasi → 65 Mahathir Muhammad Iqbal

Antara Transnasionalisme Wahhabi, Pancasila dan Kedaulatan Negara → 79 Nurrudin Al Akbar

Pancasila, Transnasionalisme Dan Kedaulatan Negara

Problematika Multikultural Dan Konstruksi Pancasila → 127 Moh. Irmawan Jauhari

Tafsir Pancasila dan Masa Depan Agama-Agama di Indonesia  $\rightarrow$ 1.50

Al Khanif

#### BAB III PANCASILA DAN KONSEP KEDAULATAN NEGARA →

Mahkamah Konstitusi Dan Eksistensi Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Pusaran Liberalisasi Ekonomi → 167 Sadhu Bagas Suratno

Pan<mark>casila dan *Original Intent* Norma Konstitusi yang Tidak D</mark>apat Diubah (*Unamendable Articles*) dalam Perubahan UUD 1945 → 185

Luthfi Widagdo Eddyono

Param<mark>eter Bern</mark>egara Bangsa <mark>Indo</mark>nesia Berdasark<mark>an Panca</mark>sila <del>></del> 20.5

Lukman Hakim

#### BAB IV MERAJUT KEINDONESIAAN DALAM KONSEP PANCASILA →

Ideologi Membumikan Pancasila Sebagai Pembangunan Indonesia → 222 Firna Novi Anggoro

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Falsafah Huma Betang di Kalimantan Tengah Dalam Rangka Menangkal Dampak Negatif Transnasionalisme  $\rightarrow$  241

#### Digital Repository Universitas Jember Pengantar Editor

Rico Septian Noor

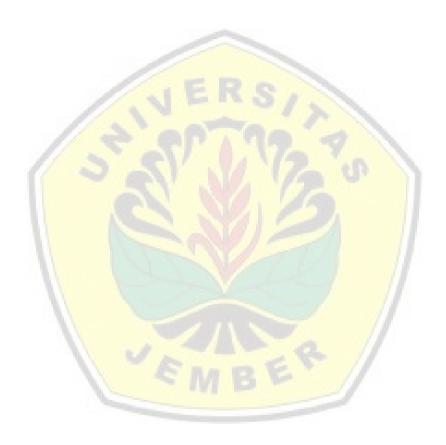




# Digital Repository Universitas Jember Daftar Isi

Keadilan Sosial bagi Perempuan Pengidap HIV/AIDS di Indonesia  $\rightarrow$  254 Paulus Eko Kristianto

Daftar Kontributor → 269







# Digital Repository Universitas Jember Daftar Kontributor

#### **Daftar Kontributor**

Abubakar Eby Hara, S.H. (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM), M.A. (International Relations RSPAS Australian National University Canberra), Ph.D. (International Relations RSPAS Australian National University Canberra), Peneliti di Center for Research in Social Sciences and Humanities C-RiSSH Universitas Jember.

Al Khanif, S.H. (Universitas Jember), M.A. (Universitas Gadjah Mada), LL.M. (Universitas Lancaster), Ph.D. (School of Oriental and African Studies/SOAS Universitas London) adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember, direktur the Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Universitas Jember dan Ketua Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia periode 2017-2019.

Baiq Wardhani, Dra. (Universitas Airlangga), MA (Monash University, Australia), Ph.D. (Monash University, Australia). Staf pengajar pada Program Studi Hubungan Internasional, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.

Firna Novi Anggoro, S.H. (Universitas Lampung), M.H. (Universitas Lampung) adalah PNS di Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

Luthfi Widagdo Eddyono, S.H. (Universitas Gadjah Mada), M.H. (Universitas Indonesia). Peneliti Mahkamah Konstitusi. Aktif pada Center for Democratization Studies, Insight Indonesia, dan Indonesia-Turkey Research Community.

Mahathir Muhammad Iqbal S.IP. (Universitas Muhammadiyah Malang), M. AP. (Universitas Brawijaya Malang). Kini bekerja sebagai staf pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

Mirza Satria Buana, S.H., (Universitas Lambung Mangkurat), M.H., (Universitas Islam Indonesia), Dr. (T.C. Beirne School of Law

Universitas Queensland) adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Paulus Eko Kristianto, S.Si. Teol (Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta), M.Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta). Kini, mahasiswa program doktor ilmu filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta dengan area konsentrasi Filsafat Kebudayaan

Vinsensio Dugis, Drs. (Universitas Airlangga), MA (University of Adelaide, Australia), Ph.D. (Flinders University, Australia). Staf Pengajar pada Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga.

Nuruddin Al Akbar, S.I.P (Universitas Gadjah Mada), M.A (Universitas Gadjah Mada). Peneliti muda di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Aktif pada Pusat Kajian Profetik Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada

Moh. Irmawan Jauhari, S. Th. I (STAIN Kediri), M. Pd. I (IAIN Tulungagung), mahasiswa doktoral PAI Multikultural (UNISMA Malang), adalah pengajar di STAI-Ma'arif Kendal Ngawi

Sadhu Bagas Suratno, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Jember)., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Jember) adalah Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi, Jawa Timur

Rico Septian Noor, S.H. (fakultas hukum Universitas Palangka Raya) M.H. (Fakultas hukum Universitas Brawijaya) adalah dosen tetap pada fakultas hukum Universitas Palangka Raya (UPR) provinsi Kalimantan Tengah

Lukman Hakim, SH (Universitas Brawijaya Malang), MH (Universitas Padjadjaran Bandung), Dr (Universitas Brawijaya Malang). Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang